

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, *Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Group, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1998, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunia, Jakarta.
- Perlindungan, Ap., 1993, *Komentator Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rubaie, Achmad., 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayu Media Publishing, Malang.
- S, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undang: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

- _____, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2018, *Buku Ajar Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Soedaryo, 2001, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1998, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2018, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyanto, 2023, *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah: Kajian Yuridis Dari UU No. 5 Tahun 1960 Sampai UU No. 11 Tahun 2020*, Unigres Press, Gresik.

Utrecht, E., 1961, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Penerbitan dan Balai Buku Ihtiar, Jakarta.

Cooter, Robert & Thomas Ulen, 2016, *Law and Economics*, 6th ed., Boston: Pearson

B. Jurnal

Adingsih, Dyah Fitriani dkk., 2023, “Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah”, *Tunas Agria*, Vol.6, No.1, 12-19.

Anugrah, F.N., 2021, “Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Vertikal Peraturan Daerah”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 1

Arnowo, Hadi, 2023, “Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan”, *Widya Bhumi*, Vol. 3 No. 2

Arsawan, I Gede Yudi, dan I Gede Yusa, 2023, “Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Amsir Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, hal. (13-22.

Dadan Suryana, 2019, “Penataan Ruang Berkelanjutan sebagai Instrumen Pembangunan Cecep Nasional”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No. 1.

- Hutama, Arya Rizki, 2024, “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia”, *Journal of Comprehensive Science (JSC)*, Vol. 3. No.6., 410-428.
- Ilmi, Ni Putu Novita Asri, 2018, “Taraf Sinkronisasi Horizontal Pengaturan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Provinsi Bali”, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Imamulhadi, 2021, “Aspek Hukum Penataan Ruang; Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6, No. 1, hal. 119-144
- Kunu, Andi Bustamin Daeng, 2012, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah: Perspektif Hukum Tanah”, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 6 No. 2
- Munthe, B.K., 2025, “Analisis Hukum Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Implementasi dalam Pembangunan Berkelanjutan”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 25
- Nurfaqih Irfani, 2020, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16. No.3, 2020, hal. (305-325).
- Nurlinda, Ida, 2011, “Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipasif dan Penataan Ruang yang Terpadu”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 2

- Puspa, Ni Komang Ari, *et al.*, 2024, “Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Guna Mendorong Reforma Agraria Berkelanjutan di Kabupaten Klungkung”, *Arcade (Jurnal)*,
- Santoso, Andini Widati, 2024, “Penyelesaian Konflik Norma Pasal 49A Ayat 1 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023”, Universitas Brawijaya, Malang.
- Setyawan, Muhammad Notarianto, dan Siti Mahmudah, 2025, “Analisis Izin PKKPR Berusaha di Darat dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah”, *Notarius*, Vol. 18, No. 2, 573-592.
- Silalahi, Dody W. Leonard dan Nabitatus Sa’adah, 2023, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Rechiidee*, Vol. 18 No. 1
- Suryana, Dadan, 2019, “Penataan Ruang Berkelanjutan sebagai Instrumen Pembangunan Nasional”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No. 1
- Susanti, Anindita Dinar, 2021, “Kajian Izin Lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinsn Berusaha”, *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang*, Vol. 14, No.3, hal. 179-191.
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2019, “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum”, *Tulisan Hukum BPK Perwakilan Sumsel*
- Utama, I Made Arya, Luh Nila Winarni, dan I Nyoman Suyatna, 2023, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan

- Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 2
- Wahid, A.M. Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang Edisi Pertama*, Kencana, Prenamedia Group, Jakarta.
- Wahyuni, I Gusti Agung Putu, *et all.*, 2024, “Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Guna Mendorong Reforma Agraria Berkelanjutan Di Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Arsitektur Arcade*, Vol. 8, No. 3
- Wahyunu, I Gusti Agung Putu, *et all.*, 2024, “Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Guna Mendorong Reforma Agraria Berkelanjutan Di Kabupaten Klungkung”, *Jurnal Arsitektur Arcade*, Vol. 8, No. 3, September 2024.
- Widya, Kertha, 2013, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1
- Wiharma, Cecep dkk., 2018, Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol, *Lex Publica*, Vol. 5 No. 1.
- Wiharma, Cecep, *et al.*, 2018, “Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol”, *Lex Publica*, Vol. 5 No. 1
- Yurista, Ananda Prima, 2022, “Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara Berjenjang dan Komprehensif”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19, No.1, 42-55.

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Santoso, Andini Widati, 2024, “Penyelesaian Konflik Norma Pasal 49A Ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Yuwono, Bagas Priyo, Nur Adhim, dan Mira Novana Ardani, 2023, “Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Suhartono, 2011, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, *Disertasi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855.

E. Lain-Lain

“Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)”, https://simtaru.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Buku-Saku-KKPR_ver-22-September-2022.pdf (Diakses pada 8 September 2025).

“Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)”, https://dpmpstsp.papubaratdayapro.gov.id/wp-content/uploads/2023/06/Buku-Saku-KKPR_ver-11-Agustus-2022.pdf (Diakses pada 8 September 2025).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, “Agraria”, KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/agraria> (Diakses pada 8 November 2025).

Definisi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/kesesuaian-kegiatan->

pemanfaatan-ruang?id=05cc5afac24a59dd69be4aad2fb91590 (Diakses pada 8 September 2025).

Galuh Shita, 2021, “Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dalam PP Nomor 21 Tahun 2021”, <https://www.handalselaras.com/pengendalian-dan-pengawasan-pemanfaatan-ruang-dalam-pp-nomor-21-tahun-2021/> (Diakses pada 10 Februari 2026).

Hadi Arnowo, “Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan”, <https://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/59> (Diakses pada 12 Februari 2026).

Infiniti Law Firm, “Panduan Lengkap PKKPR – OSS RBA”, <https://infiniti.id/blog/legal/panduan-pkkpr-di-oss-rba> (Diakses pada 12 Februari 2026).

Inka Aita Putri, “Ketentuan Baru Proses Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023”, <https://ignoslaw.com/wawasan/ketentuan-baru-proses-pengadaan-tanah-berdasarkan-peraturan-pemerintah-no-39-tahun-2023.html> (Diakses pada 10 Februari 2026).

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), https://simtaru.padangpanjang.go.id/beranda/detail_info_tataruang/kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr (Diakses pada 8 September 2025).

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), <https://sitaru.bekasikota.go.id/pages/kkpr> (Diakses pada 8 September 2025).

Laporan Ahli: Analisis Mendalam KKPR di Sistem OSS, <https://www.solusipemetaanpasti.my.id/blog-kkpr.php> (Diakses pada 8 September 2025).

Layanan PNPB Penerbitan KKPR, <https://e-mawaspnpb.kemenkeu.go.id/artikel/29> (Diakses pada 8 September 2025).

M.R. Nugraha, 2024, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806> (Diakses pada 18 Desember 2025 dan 12 Februari 2026).

Memahami Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam Proses Perizinan Berusaha, <https://tarubali.baliprov.go.id/memahami-kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr-dalam-proses-perizininan-berusaha/> (Diakses pada 8 September 2025).

Mengenal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, <https://bplawyers.co.id/2023/09/22/mengenal-kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr-sebagai-persyaratan-dasar-perizinan-berusaha/> (Diakses pada 8 September 2025).

Mengenal Lebih Dekat KKPR: Persyaratan Penting dalam Proses Perizinan Berusaha, <https://tarubali.baliprov.go.id/mengenal-lebih-dekat-kkpr->

persyaratan-penting-dalam-proses-perizinan-berusaha/ (Diakses pada 8 September 2025).

Panduan Lengkap PKKPR – OSS RBA, <https://infiniti.id/blog/legal/panduan-pkkpr-di-oss-rba> (Diakses pada 12 Februari 2026).

Pemerintah Provinsi Bali, “Asas Penataan Ruang”, <https://tarubali.baliprov.go.id/asas-penataan-ruang/> (Diakses pada 12 Februari 2026).

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha, <https://mpp.cimahikota.go.id/layanan/20/17> (Diakses pada 8 September 2025).

Shari S. Warisman, “Panduan Lengkap PKKPR – OSS RBA”, Infiniti Blog, <https://infiniti.id/blog/legal/panduan-pkkpr-di-oss-rba>, diakses pada 12 Februari 2026.